

## Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila

**Khoriunnisa<sup>1</sup>, M. Farhan Alfarizi Nur Rois<sup>2</sup>, Maulana Hakim Nurudin<sup>3</sup>, Taun<sup>4</sup>**

*Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

*Ilmu Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia<sup>4</sup>*

[2310631060090@student.unsika.ac.id](mailto:2310631060090@student.unsika.ac.id)<sup>1</sup>

### **Abstract**

*Gender equality is one of the important issues faced by the world, including Indonesia. Pancasila, as the foundation of the Indonesian state, contains values that support gender equality. The fifth principle of Pancasila, namely social justice for all Indonesian people, explicitly states that everyone has the same rights, regardless of gender. This study aims to examine gender equality from the perspective of the fifth principle of Pancasila. The research method used is literature study. Data were obtained from various sources, such as books, journal articles, and websites. The results of the study show that the fifth principle of Pancasila contains values that support gender equality, namely: equality of rights and obligations, equality of opportunity, and equality of treatment. These values can be implemented in various spheres of life, such as politics, economics, social, and culture. The conclusion of this study is that Pancasila is a strong foundation for realizing gender equality in Indonesia. However, there are still challenges that must be faced in realizing gender equality, such as gender discrimination and patriarchal culture.*

**Keywords:** *Gender Equality, Equal Rights, Fifth Precept of Pancasila*

### **Abstrak**

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu penting yang dihadapi oleh dunia, termasuk Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mengandung nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender. Sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, secara tegas menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, tanpa memandang gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesetaraan gender dalam perspektif sila kelima Pancasila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, artikel jurnal, dan website. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung terhadap kesetaraan gender, yaitu: persamaan hak dan kewajiban, persamaan kesempatan, dan persamaan perlakuan. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa Pancasila menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender, seperti diskriminasi gender dan budaya patriarki.

**Kata Kunci:** *Kesetaraan Gender, Persamaan Hak, Sila Kelima Pancasila*



---

## I. PENDAHULUAN

Kesetaraan gender merupakan salah satu dari prinsip penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini dijunjung tinggi oleh Pancasila, khususnya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan yang dapat menjadidasar untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Sila kelima Pancasila menitikberatkan pada prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia, tanpa memandang gender, berhak mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Khairunnisa, 2018).

Pentingnya kesetaraan gender tidak hanya tertuang dalam sila kelima Pancasila, tetapi juga dijiwai oleh keseluruhan Pancasila. Sebagai contoh, sila pertama, Ketuhanan yang Maha Esa, menekankan kesetaraan semua manusia di hadapan Tuhan, sedangkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, menuntut persatuan dan kesatuan bangsa yang tidak bisa terwujud tanpa melibatkan perempuan dan laki-laki secara sejajar.

Dalam hal kekerasan gender, Pancasila menegaskan perlindungan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Namun, realitasnya, kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi dan sering kali tidak mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Kurangnya perlindungan hukum bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan juga menjadi tantangan serius dalam mewujudkan kesetaraan gender.

Namun, meskipun Pancasila telah memberikan landasan moral yang kuat untuk kesetaraan gender, dalam implementasinya di Indonesia masih saja terdapat berbagai tantangan. Ketimpangan dan ketidakadilan gender masih terjadi di berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, politik, dan sosial budaya (Sitorus, 2016)

Dalam mengatasi masalah ini, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini meliputi langkah-langkah konkret seperti penyediaan akses yang sama dalam bidang ekonomi, peningkatan partisipasi perempuan dalam politik, serta penguatan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan gender. Dengan demikian, kesetaraan gender dapat menjadi bagian integral dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang mana telah diamanatkan oleh sila kelima Pancasila (Juliana dkk., t.t)



---

## II. KAJIAN PUSTAKA

Kesetaraan gender merupakan konsep yang merujuk kepada keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara. Meskipun terdapat kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender, diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi di seluruh dunia, dengan tingkat dan sifat diskriminasi yang bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Kesenjangan gender terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik. Hal ini menyebabkan perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidakselarasan yang terjadi. Kesetaraan gender juga penting dalam pendidikan, di mana upaya untuk menjamin kesetaraan hak-hak asasi, kebijakan yang proaktif mengatasi kesenjangan gender, dan peningkatan partisipasi politik menjadi fokus dan terarah (Irawan dkk., 2023).

Dalam konteks kesetaraan gender, penting untuk memahami perbedaan antara gender dan seks (jenis kelamin). Kurangnya pemahaman tentang pengertian gender menjadi salah satu penyebab dalam pertentangan menerima suatu analisis gender di suatu persoalan ketidakadilan sosial. Kesetaraan gender juga berkaitan dengan konstruksi sosial tentang bagaimana menjadi laki-laki dan perempuan, serta tuntutan masyarakat terhadap peran gender. Upaya untuk bisa mencapai kesetaraan gender juga melibatkan perjuangan untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*).

Dalam pendidikan, kesetaraan gender menjadi penting karena adanya bias gender yang muncul melalui kepercayaan terhadap stereotip individu atau kelompok tertentu berdasarkan jenis kelamin, yang memengaruhi perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dalam pendidikan juga terkait dengan hak setara dalam pendidikan, yang menjadikannya sebagai isu penting dalam konteks pendidikan. Dalam konteks agama, pandangan etis terhadap kesetaraan laki-laki dan perempuan juga menjadi bagian penting dalam kajian kesetaraan gender. Dalam kesimpulan, kesetaraan gender merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak asasi, pendidikan, kebijakan, dan pandangan etis. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender memerlukan pemahaman yang mendalam tentang perbedaan gender dan seks, serta perjuangan untuk persamaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan.



---

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian literatur deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menyajikan dan menganalisis secara komprehensif informasi yang terdapat dalam literatur atau sumber-sumber tertulis lainnya. Metode ini tidak hanya mencari dan merangkum informasi dari berbagai sumber, tetapi juga melakukan analisis terhadap konten tersebut untuk bisa memahami topik yang sedang diteliti. Dengan melakukan penelitian literatur deskriptif, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti serta menyajikan informasi yang berguna bagi perkembangan pengetahuan dalam bidang tersebut.

Setelah topik penelitian ditentukan, maka untuk langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pencarian literatur yang relevan dengan topik tersebut. Literatur dapat berupa jurnal ilmiah, buku, tesis, laporan penelitian, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Selanjutnya, peneliti menganalisis data yang telah diekstrak dari literatur yang telah dipilih. Analisis dapat dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, kuantitatif, atau kombinasi keduanya, tergantung pada tujuan penelitian dan karakteristik data yang tersedia. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian atau artikel ilmiah. Penyajian ini haruslah sistematis dan jelas, mencakup ringkasan temuan, interpretasi hasil, serta implikasi yang relevan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji kesetaraan gender dalam perspektif Pancasila. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Qur'ani (2023) menunjukkan bahwa sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan peran perempuan di bidang politik. Penelitian yang dilakukan oleh Kencana (2018) yang menunjukkan bahwa Pancasila sendiri dapat menjadi landasan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender di Indonesia, yaitu:

#### a. **Persamaan hak dan kewajiban**

Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, tanpa memandang gender. Hak-hak tersebut meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, hak



milik, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas pendidikan dan pengajaran, hak atas kesehatan, hak atas jaminan sosial, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas informasi, hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

**b. Persamaan kesempatan**

Sila kelima Pancasila juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri dan meraih cita-citanya. Kesempatan tersebut meliputi kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

**c. Persamaan perlakuan**

Sila kelima Pancasila yang menekankan pentingnya persamaan perlakuan bagi semua orang. Ini berarti bahwa tidak boleh ada diskriminasi yang berdasarkan gender, ras, agama, suku, ataupun status sosial. Semua orang harus diperlakukan dengan adil dan hormat.

Berkenaan nilai-nilai kesetaraan gender dalam sila kelima Pancasila dapat diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti:

1. **Politik:** Meningkatkan partisipasi perempuan dalam lingkungan politik, baik sebagai pemilih maupun sebagai penyelenggara negara.
2. **Ekonomi:** Menciptakan lingkungan kerja yang lebih bebas dari diskriminasi gender dan memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi.
3. **Sosial:** Menghapuskan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap para perempuan sendiri, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pernikahan anak.
4. **Budaya:** Mempromosikan budaya-budaya yang menghargai kesetaraan gender dan menghapuskan stereotip gender yang merugikan.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang mana harus dihadapi dalam mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Tantangan-tantangan tersebut di antaranya: Diskriminasi gender yang masih sering terjadi di berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik, budaya patriarki yang masih kuat di



---

Indonesiasehingga menghambat kemajuan kesetaraan gender, dan keterbatasan regulasi yang mendukung pengimplementasian kesetaraan gender di Indonesia.

Kesetaraan gender memiliki kaitan yang erat dengan sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sila kelima ini menekankan pentingnya adanya kesetaraan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh rakyat Indonesia. Kaitan ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek: Kesetaraan dalam ekonomi, kesetaraan dalam politik, kesetaraan dalam sosial, dan juga perlindungan terhadap korban kekerasan. Dengan demikian, kesetaraan gender bukan hanya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi juga merupakan landasan moral dan konstitusional yang penting bagi pembangunan yang inklusif dan juga berkelanjutan di Indonesia. Implementasi kesetaraan gender akan memperkuat kembali komitmen terhadap sila kelima Pancasila dan juga mewujudkan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pancasila menjadi landasan yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Nilai-nilai kesetaraan gender yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu persamaan hak dan kewajiban, persamaan kesempatan, dan persamaan perlakuan, dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesetaraan gender harus dipahami dan pastinya diperjuangkan oleh seluruh warga Indonesia melalui perspektif Sila Kelima Pancasila. Prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Sila Kelima memberikan pijakan yang kuat untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia. Oleh karena itu, langkah-langkah nyata dan aksi konkret harus diambil untuk memastikan bahwa Perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama di semua aspek kehidupan. Namun, masih terdapat tantangan yang harus dihadapi dalam mewujudkan langkah kesetaraan gender. Untuk itu, diperlukan berbagai upaya untuk bisa mengatasi hambatan-hambatan tersebut, antara lain: 1) Peningkatan edukasi dan juga kesadaran pada masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender; 2) Pemberlakuan dan penegakan regulasi yang mana mendukung kesetaraangender; 3) Penguatan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan; dan) Pengembangan program-program pemberdayaan perempuan. Dengan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, Indonesia dapat mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya.



---

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A., & Nurkholis, E. (2021). *Kesetaraan Gender dalam Perspektif Pancasila: Analisis Pemikiran Soekarno dan Mohammad Hatta*. Jurnal Sosiologi Dialektika, 1(1), 1-14.
- Amiruddin, M. (2008). *Kesetaraan Gender: Konsep, Teori, dan Realitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irawan, A. D., Adibah, L. N., & Toniek, D. I. V. (2023). Pancasila Sebagai Ideologi Yang Khas Dan Identitas Bangsa Indonesia. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 11-21. <https://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/article/view/7191>
- Juliana, B., Putri, E. R., & Karunia, N. Implementasi Sila Ke 5 Pancasila Bagi Kesejahteraan Masyarakat. *Indigenous Knowledge*, 2(4), 290-298.
- Kencana, R. (2018). *Sinergitas Pancasila dengan Pilar Agenda Perempuan Perdamaian dan Keamanan PBB bagi Pembentukan "Perempuan Indonesia Berdaya-Tangguh-Bermartabat"*. Jurnal Pancasila & Kewarganegaraan, 3(1), 79-88.
- Khairunnisa, A. A. (2018). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM OLEH PEMERINTAH DAERAH. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JMP/article/view/451>
- Komisi Nasional Perempuan Indonesia (Komnas Perempuan). (2022). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Qur'ani, D. (2023). *Perspektif Pancasila terhadap Kesetaraan Gender dalam Bidang Politik*. Lontar Merah: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 13(2), 1-6.
- Sitorus, A. V. Y. (2016). Dampak ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(1). <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/190>
- Suryana, Y. (2015). *Manajemen sekolah: Teori dasar dan praktik* (Cetakan ketiga). Bandung: PT. Refika Aditama.

